



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS DAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 352);
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 57).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kepala UPT Badan adalah Kepala UPT pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
13. Kepala UPT Dinas adalah Kepala UPT pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah UPT perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dengan bentuk kelembagaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
15. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan Formal untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan pada taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa.
16. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
19. Surat pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk :
  - a. UPTD berkedudukan pada Badan; dan
  - b. UPTD berkedudukan pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jabatan Kepala UPT pada Badan dan Dinas adalah Eselon IV.b
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk UPT Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan Formal untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan pada taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Jabatan Kepala Sekolah adalah Jabatan Fungsional Guru.

### Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi UPT pada Badan dan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPT Badan

#### Pasal 4

- UPT Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja :
    1. Kecamatan Prigen;
    2. Kecamatan Pandaan;

3. Kecamatan Gempol;
  4. Kecamatan Sukorejo;
  5. Kecamatan Purwosari;
  6. Kecamatan Purwodadi;
  7. Kecamatan Tukur;
  8. Kecamatan Beji; dan
  9. Kecamatan Bangil.
- b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja :
1. Kecamatan Kejayan;
  2. Kecamatan Pohjentrek;
  3. Kecamatan Kraton;
  4. Kecamatan Rembang;
  5. Kecamatan Wonorejo;
  6. Kecamatan Gondangwetan;
  7. Kecamatan Pasrepan;
  8. Kecamatan Puspo;
  9. Kecamatan Tosari;
  10. Kecamatan Winongan;
  11. Kecamatan Rejoso;
  12. Kecamatan Lekok;
  13. Kecamatan Grati;
  14. Kecamatan Lumbang; dan
  15. Kecamatan Nguling.

#### Pasal 5

Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dan Wilayah II pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, terdiri atas :

- a. Kepala UPT; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 6

- (1) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dan Wilayah II pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Badan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;

- b. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dan administratif perpajakan daerah di wilayah kerja masing-masing berdasarkan arahan dan kebijakan teknis dari Badan Pendapatan Daerah
  - c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah kecuali PBB-P2, BPHTB dan PBJT atas tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - d. pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan nilai tertentu yang ditentukan lebih lanjut dalam SOP;
  - e. pelaksanaan pendistribusian SPPT PBB-P2 dengan nilai ketetapan tertentu yang ditentukan lebih lanjut dalam SOP dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - f. pemberian layanan informasi kepada masyarakat dan wajib pajak terkait jenis, objek, dan ketentuan pajak daerah;
  - g. pelaksanaan membuka dan mengelola loket pelayanan pajak di wilayah kerja masing-masing;
  - h. penerimaan berkas permohonan pelayanan pajak dari wajib pajak dan menyampaikannya ke bidang teknisnya;
  - i. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat berdasarkan bahan dan panduan resmi;
  - j. penyampaian dokumen perpajakan hasil cetak kepada wajib pajak;
  - k. penyampaian surat pemberitahuan dan teguran administratif tahap awal atas tunggakan pajak;
  - l. pelaksanaan kunjungan imbauan lapangan kepada wajib pajak yang belum membayar;
  - m. penampung keluhan atau pengaduan wajib pajak untuk ditindaklanjuti ke bidang teknisnya;
  - n. pengelola arsip dan dokumentasi pelayanan pajak daerah di tingkat UPT;
  - o. pemberian bantuan teknis lapangan seperti pendampingan kegiatan survei atau monitoring oleh tim/bidang;
  - p. pelaksanaan membantu wajib pajak menggunakan aplikasi atau sistem online pajak daerah; dan
  - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;
  - b. menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan pajak daerah kecuali PBB-P2, BPHTB dan PBJT atas tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - c. melaksanakan penagihan pajak daerah;

- d. melaksanakan pendistribusian SPPT PBB-P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua  
UPT Dinas

Pasal 7

UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. UPT Latihan Kerja Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan;
- b. UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
- d. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- e. UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- f. UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- g. UPT Budidaya Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- h. UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- i. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. UPT Pengelolaan Kayu dan Logam pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Pandaan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- m. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Purwosari pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- n. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- o. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Grati pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- p. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- q. UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, membawahi :

| NO | UPT SATUAN PENDIDIKAN    | KECAMATAN    |
|----|--------------------------|--------------|
| 1  | TKN PEMBINA BANGIL       | BANGIL       |
| 2  | TKN PEMBINA PRIGEN       | PRIGEN       |
| 3  | TKN PEMBINA PURWOSARI    | PURWOSARI    |
| 4  | TKN PEMBINA GONDANGWETAN | GONDANGWETAN |

| <b>NO</b> | <b>UPT SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>KECAMATAN</b> |
|-----------|------------------------------|------------------|
| 1         | SDN BENDOMUNGAL I            | BANGIL           |
| 2         | SDN BENDOMUNGAL II           | BANGIL           |
| 3         | SDN DERMO I                  | BANGIL           |
| 4         | SDN DERMO II                 | BANGIL           |
| 5         | SDN GEMPENG I                | BANGIL           |
| 6         | SDN GEMPENG II               | BANGIL           |
| 7         | SDN KALIANYAR I              | BANGIL           |
| 8         | SDN KALIANYAR II             | BANGIL           |
| 9         | SDN KALIREJO                 | BANGIL           |
| 10        | SDN KAUMAN                   | BANGIL           |
| 11        | SDN KERSIKAN I               | BANGIL           |
| 12        | SDN KERSIKAN II              | BANGIL           |
| 13        | SDN KIDULDALEM I             | BANGIL           |
| 14        | SDN KIDULDALEM III           | BANGIL           |
| 15        | SDN KIDULDALEM IV            | BANGIL           |
| 16        | SDN KOLURSARI I              | BANGIL           |
| 17        | SDN KOLURSARI II             | BANGIL           |
| 18        | SDN LATEK                    | BANGIL           |
| 19        | SDN MANARUWI I               | BANGIL           |
| 20        | SDN MASANGAN                 | BANGIL           |
| 21        | SDN POGAR I                  | BANGIL           |
| 22        | SDN POGAR II                 | BANGIL           |
| 23        | SDN POGAR III                | BANGIL           |
| 24        | SDN RACI I                   | BANGIL           |
| 25        | SDN RACI II                  | BANGIL           |
| 26        | SDN TAMBAKAN                 | BANGIL           |
| 27        | SDN BAUJENG I BEJI           | BEJI             |
| 28        | SDN BAUJENG II BEJI          | BEJI             |
| 29        | SDN BEJI I                   | BEJI             |
| 30        | SDN BEJI II                  | BEJI             |
| 31        | SDN BEJI IV                  | BEJI             |
| 32        | SDN CANGKRINGMALANG I        | BEJI             |
| 33        | SDN CANGKRINGMALANG II       | BEJI             |
| 34        | SDN CANGKRINGMALANG III      | BEJI             |
| 35        | SDN GAJAH BENDO              | BEJI             |
| 36        | SDN GLANGGANG I              | BEJI             |
| 37        | SDN GLANGGANG II             | BEJI             |
| 38        | SDN GUNUNGGANGSIR I          | BEJI             |
| 39        | SDN GUNUNGGANGSIR II         | BEJI             |
| 40        | SDN GUNUNGGANGSIR III        | BEJI             |
| 41        | SDN GUNUNGSARI I             | BEJI             |
| 42        | SDN GUNUNGSARI II            | BEJI             |
| 43        | SDN KEDUNGBOTO BEJI          | BEJI             |
| 44        | SDN KEDUNGRINGIN I           | BEJI             |
| 45        | SDN KEDUNGRINGIN II          | BEJI             |
| 46        | SDN KEDUNGRINGIN III         | BEJI             |
| 47        | SDN KEDUNGRINGIN IV          | BEJI             |
| 48        | SDN KENEP                    | BEJI             |
| 49        | SDN NGEMBE I                 | BEJI             |
| 50        | SDN PAGAK                    | BEJI             |
| 51        | SDN SIDOWAYAH                | BEJI             |



|     |                     |              |
|-----|---------------------|--------------|
| 52  | SDN SUMBERSARI I    | BEJI         |
| 53  | SDN SUMBERSARI II   | BEJI         |
| 54  | SDN BULUSARI I      | GEMPOL       |
| 55  | SDN BULUSARI II     | GEMPOL       |
| 56  | SDN CARAT I         | GEMPOL       |
| 57  | SDN CARAT II        | GEMPOL       |
| 58  | SDN GEMPOL I        | GEMPOL       |
| 59  | SDN GEMPOL II       | GEMPOL       |
| 60  | SDN GEMPOL III      | GEMPOL       |
| 61  | SDN JERUK PURUT I   | GEMPOL       |
| 62  | SDN JERUK PURUT II  | GEMPOL       |
| 63  | SDN KARANGREJO I    | GEMPOL       |
| 64  | SDN KARANGREJO II   | GEMPOL       |
| 65  | SDN KARANGREJO III  | GEMPOL       |
| 66  | SDN KEJAPANAN I     | GEMPOL       |
| 67  | SDN KEJAPANAN II    | GEMPOL       |
| 68  | SDN KEJAPANAN III   | GEMPOL       |
| 69  | SDN KEJAPANAN IV    | GEMPOL       |
| 70  | SDN KEJAPANAN V     | GEMPOL       |
| 71  | SDN KEPULUNGAN I    | GEMPOL       |
| 72  | SDN KEPULUNGAN II   | GEMPOL       |
| 73  | SDN KEPULUNGAN III  | GEMPOL       |
| 74  | SDN NGERONG         | GEMPOL       |
| 75  | SDN PANDEREJO       | GEMPOL       |
| 76  | SDN RANDUPITU       | GEMPOL       |
| 77  | SDN SUMBERSUKO I    | GEMPOL       |
| 78  | SDN SUMBERSUKO II   | GEMPOL       |
| 79  | SDN WATUKOSEK       | GEMPOL       |
| 80  | SDN WINONG I        | GEMPOL       |
| 81  | SDN WINONG II       | GEMPOL       |
| 82  | SDN WONOSARI        | GEMPOL       |
| 83  | SDN WONOSUNYO I     | GEMPOL       |
| 84  | SDN WONOSUNYO II    | GEMPOL       |
| 85  | SDN BAJANGAN        | GONDANGWETAN |
| 86  | SDN BAYEMAN I       | GONDANGWETAN |
| 87  | SDN BAYEMAN II      | GONDANGWETAN |
| 88  | SDN BRAMBANG        | GONDANGWETAN |
| 89  | SDN GAYAM I         | GONDANGWETAN |
| 90  | SDN GONDANGREJO     | GONDANGWETAN |
| 91  | SDN GONDANGWETAN I  | GONDANGWETAN |
| 92  | SDN GONDANGWETAN II | GONDANGWETAN |
| 93  | SDN GROGOL          | GONDANGWETAN |
| 94  | SDN KALIREJO        | GONDANGWETAN |
| 95  | SDN KARANGSENTUL I  | GONDANGWETAN |
| 96  | SDN KEBONCANDI      | GONDANGWETAN |
| 97  | SDN KERSIKAN        | GONDANGWETAN |
| 98  | SDN LAJUK           | GONDANGWETAN |
| 99  | SDN PATEGUHAN       | GONDANGWETAN |
| 100 | SDN PEKANGKUNGAN    | GONDANGWETAN |
| 101 | SDN RANGGEH         | GONDANGWETAN |
| 102 | SDN SEKARPUTIH      | GONDANGWETAN |
| 103 | SDN TEBAS           | GONDANGWETAN |

|     |                        |              |
|-----|------------------------|--------------|
| 104 | SDN TENGGILISREJO      | GONDANGWETAN |
| 105 | SDN WONOJATI           | GONDANGWETAN |
| 106 | SDN WONOSARI           | GONDANGWETAN |
| 107 | SDN CUKURGONDANG I     | GRATI        |
| 108 | SDN CUKURGONDANG II    | GRATI        |
| 109 | SDN GRATI I            | GRATI        |
| 110 | SDN GRATI II           | GRATI        |
| 111 | SDN GRATI IV           | GRATI        |
| 112 | SDN KALIPANG I         | GRATI        |
| 113 | SDN KALIPANG II        | GRATI        |
| 114 | SDN KAMBINGANREJO      | GRATI        |
| 115 | SDN KARANGKLIWON       | GRATI        |
| 116 | SDN KARANGLO I         | GRATI        |
| 117 | SDN KARANGLO II        | GRATI        |
| 118 | SDN KEBONREJO I        | GRATI        |
| 119 | SDN KEBONREJO II       | GRATI        |
| 120 | SDN KEDAWUNGKULON I    | GRATI        |
| 121 | SDN KEDAWUNGKULON II   | GRATI        |
| 122 | SDN KEDAWUNGKULON III  | GRATI        |
| 123 | SDN KEDAWUNGWETAN I    | GRATI        |
| 124 | SDN KEDAWUNGWETAN II   | GRATI        |
| 125 | SDN KEDAWUNGWETAN III  | GRATI        |
| 126 | SDN KEDAWUNGWETAN IV   | GRATI        |
| 127 | SDN PLOSOSARI I        | GRATI        |
| 128 | SDN PLOSOSARI II       | GRATI        |
| 129 | SDN PLOSOSARI III      | GRATI        |
| 130 | SDN RANUKLINDUNGAN I   | GRATI        |
| 131 | SDN RANUKLINDUNGAN II  | GRATI        |
| 132 | SDN REBALAS I          | GRATI        |
| 133 | SDN REBALAS II         | GRATI        |
| 134 | SDN REBALAS III        | GRATI        |
| 135 | SDN SUMBERAGUNG I      | GRATI        |
| 136 | SDN SUMBERAGUNG II     | GRATI        |
| 137 | SDN SUMBERDAWESARI I   | GRATI        |
| 138 | SDN SUMBERDAWESARI III | GRATI        |
| 139 | SDN SUMBERDAWESARI IV  | GRATI        |
| 140 | SDN TREWUNG            | GRATI        |
| 141 | SDN AMBAL-AMBIL I      | KEJAYAN      |
| 142 | SDN AMBAL-AMBIL II     | KEJAYAN      |
| 143 | SDN BENERWOJO          | KEJAYAN      |
| 144 | SDN COBANJOYO I        | KEJAYAN      |
| 145 | SDN COBANJOYO II       | KEJAYAN      |
| 146 | SDN KEDEMUNGAN I       | KEJAYAN      |
| 147 | SDN KEDEMUNGAN II      | KEJAYAN      |
| 148 | SDN KEDUNG PENGARON I  | KEJAYAN      |
| 149 | SDN KEDUNG PENGARON II | KEJAYAN      |
| 150 | SDN KEJAYAN            | KEJAYAN      |
| 151 | SDN KEPUH              | KEJAYAN      |
| 152 | SDN KETANGIREJO I      | KEJAYAN      |
| 153 | SDN KETANGIREJO II     | KEJAYAN      |
| 154 | SDN KLANGRONG I        | KEJAYAN      |
| 155 | SDN KLANGRONG II       | KEJAYAN      |

|     |                      |         |
|-----|----------------------|---------|
| 156 | SDN KLINTER          | KEJAYAN |
| 157 | SDN KURUNG I         | KEJAYAN |
| 158 | SDN KURUNG II        | KEJAYAN |
| 159 | SDN LINGGO           | KEJAYAN |
| 160 | SDN LOROKAN I        | KEJAYAN |
| 161 | SDN LOROKAN II       | KEJAYAN |
| 162 | SDN LUWUK            | KEJAYAN |
| 163 | SDN ORO-ORO PULE     | KEJAYAN |
| 164 | SDN PACARKEKELING I  | KEJAYAN |
| 165 | SDN PACARKEKELING II | KEJAYAN |
| 166 | SDN PATEBON          | KEJAYAN |
| 167 | SDN RANDUGONG        | KEJAYAN |
| 168 | SDN SLADI            | KEJAYAN |
| 169 | SDN SUMBERBANTENG    | KEJAYAN |
| 170 | SDN SUMBERSUKO       | KEJAYAN |
| 171 | SDN TANGGULANGIN     | KEJAYAN |
| 172 | SDN TUNDOSORO        | KEJAYAN |
| 173 | SDN WANGKALWETAN     | KEJAYAN |
| 174 | SDN WRATI I          | KEJAYAN |
| 175 | SDN WRATI II         | KEJAYAN |
| 176 | SDN WRATI III        | KEJAYAN |
| 177 | SDN ASEMKANDANG      | KRATON  |
| 178 | SDN BENDUNGAN        | KRATON  |
| 179 | SDN CURAHDUKUH I     | KRATON  |
| 180 | SDN CURAHDUKUH II    | KRATON  |
| 181 | SDN DHOMPO I         | KRATON  |
| 182 | SDN DHOMPO II        | KRATON  |
| 183 | SDN GAMBIRKUNING     | KRATON  |
| 184 | SDN GERONGAN         | KRATON  |
| 185 | SDN JERUK            | KRATON  |
| 186 | SDN KALIREJO         | KRATON  |
| 187 | SDN KARANGANYAR I    | KRATON  |
| 188 | SDN KARANGANYAR II   | KRATON  |
| 189 | SDN KEBOTOHAN        | KRATON  |
| 190 | SDN KLAMPISREJO      | KRATON  |
| 191 | SDN KRATON           | KRATON  |
| 192 | SDN MULYOREJO        | KRATON  |
| 193 | SDN NGABAR           | KRATON  |
| 194 | SDN NGEMPIT          | KRATON  |
| 195 | SDN PLINGGISAN I     | KRATON  |
| 196 | SDN PUKUL            | KRATON  |
| 197 | SDN PULOKERTO        | KRATON  |
| 198 | SDN REJOSARI I       | KRATON  |
| 199 | SDN SELOTAMBAK       | KRATON  |
| 200 | SDN SEMARE           | KRATON  |
| 201 | SDN SIDOGIRI         | KRATON  |
| 202 | SDN SLAMBRIT         | KRATON  |
| 203 | SDN TAMBAKREJO       | KRATON  |
| 204 | SDN TAMBAKSARI       | KRATON  |
| 205 | SDN ALASTLOGO I      | LEKOK   |
| 206 | SDN BALUNGANYAR      | LEKOK   |
| 207 | SDN BRANANG I        | LEKOK   |

|     |                     |         |
|-----|---------------------|---------|
| 208 | SDN BRANANG II      | LEKOK   |
| 209 | SDN GEJUGJATI I     | LEKOK   |
| 210 | SDN GEJUGJATI II    | LEKOK   |
| 211 | SDN GEJUGJATI III   | LEKOK   |
| 212 | SDN JATIREJO I      | LEKOK   |
| 213 | SDN JATIREJO II     | LEKOK   |
| 214 | SDN PASINAN I       | LEKOK   |
| 215 | SDN PASINAN II      | LEKOK   |
| 216 | SDN PASINAN III     | LEKOK   |
| 217 | SDN ROWOGEMPOL I    | LEKOK   |
| 218 | SDN ROWOGEMPOL III  | LEKOK   |
| 219 | SDN SEMEDUSARI I    | LEKOK   |
| 220 | SDN TAMBAKLEKOK I   | LEKOK   |
| 221 | SDN TAMBAKLEKOK III | LEKOK   |
| 222 | SDN TAMPUNG I       | LEKOK   |
| 223 | SDN TAMPUNG II      | LEKOK   |
| 224 | SDN WATES I         | LEKOK   |
| 225 | SDN WATES III       | LEKOK   |
| 226 | SDN BANJARIMBO I    | LUMBANG |
| 227 | SDN BANJARIMBO II   | LUMBANG |
| 228 | SDN BULUKANDANG I   | LUMBANG |
| 229 | SDN BULUKANDANG II  | LUMBANG |
| 230 | SDN CUKURGULING I   | LUMBANG |
| 231 | SDN CUKURGULING II  | LUMBANG |
| 232 | SDN CUKURGULING III | LUMBANG |
| 233 | SDN KARANGASEM I    | LUMBANG |
| 234 | SDN KARANGASEM II   | LUMBANG |
| 235 | SDN KARANGJATI I    | LUMBANG |
| 236 | SDN KARANGJATI II   | LUMBANG |
| 237 | SDN KRONTO I        | LUMBANG |
| 238 | SDN KRONTO III      | LUMBANG |
| 239 | SDN LUMBANG I       | LUMBANG |
| 240 | SDN LUMBANG III     | LUMBANG |
| 241 | SDN PANCUR I        | LUMBANG |
| 242 | SDN PANCUR II       | LUMBANG |
| 243 | SDN PANCUR III      | LUMBANG |
| 244 | SDN PANDITAN I      | LUMBANG |
| 245 | SDN PANDITAN II     | LUMBANG |
| 246 | SDN WATULUMBUNG II  | LUMBANG |
| 247 | SDN WATULUMBUNG III | LUMBANG |
| 248 | SDN WATULUMBUNG IV  | LUMBANG |
| 249 | SDN WELULANG I      | LUMBANG |
| 250 | SDN WONOREJO I      | LUMBANG |
| 251 | SDN WONOREJO II     | LUMBANG |
| 252 | SDN DANDANGGENDIS I | NGULING |
| 253 | SDN KAPASAN I       | NGULING |
| 254 | SDN KAPASAN II      | NGULING |
| 255 | SDN KEDAWANG I      | NGULING |
| 256 | SDN KEDAWANG II     | NGULING |
| 257 | SDN MLATEN I        | NGULING |
| 258 | SDN NGULING I       | NGULING |
| 259 | SDN NGULING II      | NGULING |

|     |                       |         |
|-----|-----------------------|---------|
| 260 | SDN NGULING III       | NGULING |
| 261 | SDN PENUNGGUL         | NGULING |
| 262 | SDN RANDUATI          | NGULING |
| 263 | SDN SANGANOM I        | NGULING |
| 264 | SDN SANGANOM II       | NGULING |
| 265 | SDN SEBALONG          | NGULING |
| 266 | SDN SEDARUM I         | NGULING |
| 267 | SDN SEDARUM II        | NGULING |
| 268 | SDN SUDIMULYO I       | NGULING |
| 269 | SDN SUMBERANYAR I     | NGULING |
| 270 | SDN SUMBERANYAR II    | NGULING |
| 271 | SDN SUMBERANYAR III   | NGULING |
| 272 | SDN SUMBERANYAR IV    | NGULING |
| 273 | SDN WATESTANI I       | NGULING |
| 274 | SDN WATESTANI IV      | NGULING |
| 275 | SDN WATUPRAPAT I      | NGULING |
| 276 | SDN WATUPRAPAT II     | NGULING |
| 277 | SDN WATUPRAPAT III    | NGULING |
| 278 | SDN WOTGALIH I        | NGULING |
| 279 | SDN WOTGALIH II       | NGULING |
| 280 | SDN BANJARKEJEN       | PANDAAN |
| 281 | SDN BANJARSARI        | PANDAAN |
| 282 | SDN DURENSEWU I       | PANDAAN |
| 283 | SDN DURENSEWU II      | PANDAAN |
| 284 | SDN JOGOSARI I        | PANDAAN |
| 285 | SDN JOGOSARI II       | PANDAAN |
| 286 | SDN KARANGJATI I      | PANDAAN |
| 287 | SDN KARANGJATI II     | PANDAAN |
| 288 | SDN KARANGJATI III    | PANDAAN |
| 289 | SDN KEBON WARIS I     | PANDAAN |
| 290 | SDN KEMIRISEWU I      | PANDAAN |
| 291 | SDN KEMIRISEWU II     | PANDAAN |
| 292 | SDN KUTOREJO I        | PANDAAN |
| 293 | SDN KUTOREJO II       | PANDAAN |
| 294 | SDN NOGOSARI I        | PANDAAN |
| 295 | SDN PANDAAN I         | PANDAAN |
| 296 | SDN PANDAAN II        | PANDAAN |
| 297 | SDN PETUNGASRI I      | PANDAAN |
| 298 | SDN PETUNGASRI III    | PANDAAN |
| 299 | SDN PLINTAHAN I       | PANDAAN |
| 300 | SDN PLINTAHAN II      | PANDAAN |
| 301 | SDN SEBANI I          | PANDAAN |
| 302 | SDN SUMBEREJO I       | PANDAAN |
| 303 | SDN SUMBEREJO II      | PANDAAN |
| 304 | SDN SUMBERGEDANG I    | PANDAAN |
| 305 | SDN SUMBERGEDANG II   | PANDAAN |
| 306 | SDN SUMBERGEDANG III  | PANDAAN |
| 307 | SDN TAWANGREJO I      | PANDAAN |
| 308 | SDN TAWANGREJO II     | PANDAAN |
| 309 | SDN TUNGGUL WULUNG I  | PANDAAN |
| 310 | SDN TUNGGUL WULUNG II | PANDAAN |
| 311 | SDN WEDORO I          | PANDAAN |

|     |                     |            |
|-----|---------------------|------------|
| 312 | SDN WEDORO II       | PANDAAN    |
| 313 | SDN AMPELSARI I     | PASREPAN   |
| 314 | SDN AMPELSARI III   | PASREPAN   |
| 315 | SDN CENGKRONG       | PASREPAN   |
| 316 | SDN GALIH I         | PASREPAN   |
| 317 | SDN GALIH II        | PASREPAN   |
| 318 | SDN JOGOREPUH       | PASREPAN   |
| 319 | SDN KLAKAH          | PASREPAN   |
| 320 | SDN LEMAHBANG       | PASREPAN   |
| 321 | SDN MANGGUAN I      | PASREPAN   |
| 322 | SDN MANGGUAN II     | PASREPAN   |
| 323 | SDN NGANTUNGAN I    | PASREPAN   |
| 324 | SDN NGANTUNGAN II   | PASREPAN   |
| 325 | SDN PASREPAN I      | PASREPAN   |
| 326 | SDN PASREPAN III    | PASREPAN   |
| 327 | SDN PETUNG I        | PASREPAN   |
| 328 | SDN PETUNG II       | PASREPAN   |
| 329 | SDN PETUNG III      | PASREPAN   |
| 330 | SDN POHGADING       | PASREPAN   |
| 331 | SDN POHGEDANG       | PASREPAN   |
| 332 | SDN REJOSALAM I     | PASREPAN   |
| 333 | SDN REJOSALAM II    | PASREPAN   |
| 334 | SDN SAPULANTE       | PASREPAN   |
| 335 | SDN SIBON I         | PASREPAN   |
| 336 | SDN SIBON II        | PASREPAN   |
| 337 | SDN TAMBAKREJO      | PASREPAN   |
| 338 | SDN TEMPURAN I      | PASREPAN   |
| 339 | SDN TEMPURAN II     | PASREPAN   |
| 340 | SDN TEMPURAN III    | PASREPAN   |
| 341 | SDN LOGOWOK I       | POHJENTREK |
| 342 | SDN PARASREJO I     | POHJENTREK |
| 343 | SDN PARASREJO II    | POHJENTREK |
| 344 | SDN PLERET I        | POHJENTREK |
| 345 | SDN PLERET II       | POHJENTREK |
| 346 | SDN PLERET III      | POHJENTREK |
| 347 | SDN SUKOREJO        | POHJENTREK |
| 348 | SDN SUNGIKULON      | POHJENTREK |
| 349 | SDN SUNGIWETAN      | POHJENTREK |
| 350 | SDN SUSUKANREJO I   | POHJENTREK |
| 351 | SDN SUSUKANREJO III | POHJENTREK |
| 352 | SDN TIDU I          | POHJENTREK |
| 353 | SDN WARUNGDOWNO I   | POHJENTREK |
| 354 | SDN BULUKANDANG I   | PRIGEN     |
| 355 | SDN BULUKANDANG II  | PRIGEN     |
| 356 | SDN CANDIWATES I    | PRIGEN     |
| 357 | SDN CANDIWATES II   | PRIGEN     |
| 358 | SDN DAYUREJO I      | PRIGEN     |
| 359 | SDN DAYUREJO II     | PRIGEN     |
| 360 | SDN DAYUREJO III    | PRIGEN     |
| 361 | SDN DAYUREJO IV     | PRIGEN     |
| 362 | SDN GAMBIRAN I      | PRIGEN     |
| 363 | SDN GAMBIRAN III    | PRIGEN     |

|     |                        |           |
|-----|------------------------|-----------|
| 364 | SDN JATIARJO I         | PRIGEN    |
| 365 | SDN JATIARJO II        | PRIGEN    |
| 366 | SDN KETANIRENG         | PRIGEN    |
| 367 | SDN LEDUG I            | PRIGEN    |
| 368 | SDN LEDUG II           | PRIGEN    |
| 369 | SDN LUMBANGREJO I      | PRIGEN    |
| 370 | SDN LUMBANGREJO II     | PRIGEN    |
| 371 | SDN PECALUKAN I        | PRIGEN    |
| 372 | SDN PECALUKAN IV       | PRIGEN    |
| 373 | SDN PECALUKAN V        | PRIGEN    |
| 374 | SDN PRIGEN I           | PRIGEN    |
| 375 | SDN PRIGEN II          | PRIGEN    |
| 376 | SDN SEKARJOHO I        | PRIGEN    |
| 377 | SDN SEKARJOHO II       | PRIGEN    |
| 378 | SDN SUKOLILO I         | PRIGEN    |
| 379 | SDN SUKOLILO II        | PRIGEN    |
| 380 | SDN SUKORENO I         | PRIGEN    |
| 381 | SDN SUKORENO II        | PRIGEN    |
| 382 | SDN SUKORENO III       | PRIGEN    |
| 383 | SDN WATUAGUNG I        | PRIGEN    |
| 384 | SDN WATUAGUNG II       | PRIGEN    |
| 385 | SDN CAPANG I           | PURWODADI |
| 386 | SDN CAPANG II          | PURWODADI |
| 387 | SDN COWEK I            | PURWODADI |
| 388 | SDN COWEK II           | PURWODADI |
| 389 | SDN COWEK III          | PURWODADI |
| 390 | SDN DAWUHAN SENGON I   | PURWODADI |
| 391 | SDN DAWUHAN SENGON II  | PURWODADI |
| 392 | SDN DAWUHAN SENGON III | PURWODADI |
| 393 | SDN DAWUHAN SENGON IV  | PURWODADI |
| 394 | SDN GAJAHREJO I        | PURWODADI |
| 395 | SDN GAJAHREJO II       | PURWODADI |
| 396 | SDN GERBO I            | PURWODADI |
| 397 | SDN GERBO II           | PURWODADI |
| 398 | SDN GERBO III          | PURWODADI |
| 399 | SDN GERBO IV           | PURWODADI |
| 400 | SDN GERBO V            | PURWODADI |
| 401 | SDN GERBO VI           | PURWODADI |
| 402 | SDN JATISARI I         | PURWODADI |
| 403 | SDN JATISARI II        | PURWODADI |
| 404 | SDN JATISARI III       | PURWODADI |
| 405 | SDN JATISARI IV        | PURWODADI |
| 406 | SDN LEBAKREJO I        | PURWODADI |
| 407 | SDN LEBAKREJO II       | PURWODADI |
| 408 | SDN LEBAKREJO III      | PURWODADI |
| 409 | SDN LEBAKREJO IV       | PURWODADI |
| 410 | SDN PAREREJO I         | PURWODADI |
| 411 | SDN PAREREJO II        | PURWODADI |
| 412 | SDN PAREREJO III       | PURWODADI |
| 413 | SDN PUCANGSARI I       | PURWODADI |
| 414 | SDN PUCANGSARI II      | PURWODADI |
| 415 | SDN PURWODADI I        | PURWODADI |

|     |                       |           |
|-----|-----------------------|-----------|
| 416 | SDN PURWODADI II      | PURWODADI |
| 417 | SDN PURWODADI III     | PURWODADI |
| 418 | SDN SEMUT             | PURWODADI |
| 419 | SDN SENTUL I          | PURWODADI |
| 420 | SDN SENTUL II         | PURWODADI |
| 421 | SDN TAMBAKSARI I      | PURWODADI |
| 422 | SDN TAMBAKSARI III    | PURWODADI |
| 423 | SDN BAKALAN I         | PURWOSARI |
| 424 | SDN BAKALAN II        | PURWOSARI |
| 425 | SDN BAKALAN III       | PURWOSARI |
| 426 | SDN CENDONO I         | PURWOSARI |
| 427 | SDN CENDONO II        | PURWOSARI |
| 428 | SDN KARANGREJO I      | PURWOSARI |
| 429 | SDN KARANGREJO II     | PURWOSARI |
| 430 | SDN KAYOMAN           | PURWOSARI |
| 431 | SDN KERTOSARI I       | PURWOSARI |
| 432 | SDN KERTOSARI II      | PURWOSARI |
| 433 | SDN MARTOPURO I       | PURWOSARI |
| 434 | SDN MARTOPURO II      | PURWOSARI |
| 435 | SDN MARTOPURO III     | PURWOSARI |
| 436 | SDN MARTOPURO IV      | PURWOSARI |
| 437 | SDN MARTOPURO V       | PURWOSARI |
| 438 | SDN PAGER I           | PURWOSARI |
| 439 | SDN PAGER II          | PURWOSARI |
| 440 | SDN PUCANGSARI I      | PURWOSARI |
| 441 | SDN PUCANGSARI II     | PURWOSARI |
| 442 | SDN PURWOSARI I       | PURWOSARI |
| 443 | SDN PURWOSARI II      | PURWOSARI |
| 444 | SDN PURWOSARI III     | PURWOSARI |
| 445 | SDN SEKARMOJO I       | PURWOSARI |
| 446 | SDN SEKARMOJO II      | PURWOSARI |
| 447 | SDN SEKARMOJO III     | PURWOSARI |
| 448 | SDN SENGON I          | PURWOSARI |
| 449 | SDN SENGON II         | PURWOSARI |
| 450 | SDN SUKODERMO         | PURWOSARI |
| 451 | SDN SUMBEREJO I       | PURWOSARI |
| 452 | SDN SUMBEREJO II      | PURWOSARI |
| 453 | SDN SUMBEREJO III     | PURWOSARI |
| 454 | SDN SUMBERSUKO I      | PURWOSARI |
| 455 | SDN SUMBERSUKO II     | PURWOSARI |
| 456 | SDN TEJOWANGI I       | PURWOSARI |
| 457 | SDN TEJOWANGI II      | PURWOSARI |
| 458 | SDN TEJOWANGI III     | PURWOSARI |
| 459 | SDN JANJANGWULUNG I   | PUSPO     |
| 460 | SDN JANJANGWULUNG II  | PUSPO     |
| 461 | SDN JANJANGWULUNG III | PUSPO     |
| 462 | SDN JIMBARAN I        | PUSPO     |
| 463 | SDN JIMBARAN II       | PUSPO     |
| 464 | SDN JIMBARAN III      | PUSPO     |
| 465 | SDN JIMBARAN IV       | PUSPO     |
| 466 | SDN KEDUWUNG I        | PUSPO     |
| 467 | SDN KEDUWUNG II       | PUSPO     |



|     |                           |         |
|-----|---------------------------|---------|
| 468 | SDN KEMIRI                | PUSPO   |
| 469 | SDN PALANGSARI I          | PUSPO   |
| 470 | SDN PALANGSARI II         | PUSPO   |
| 471 | SDN PALANGSARI III        | PUSPO   |
| 472 | SDN PUSPO I               | PUSPO   |
| 473 | SDN PUSPO III             | PUSPO   |
| 474 | SDN PUSPO IV              | PUSPO   |
| 475 | SDN PUSPO V               | PUSPO   |
| 476 | SDN PUSUNGMALANG I        | PUSPO   |
| 477 | SDN PUSUNGMALANG II       | PUSPO   |
| 478 | SDN ARJOSARI I            | REJOSO  |
| 479 | SDN ARJOSARI II           | REJOSO  |
| 480 | SDN JARANGAN I            | REJOSO  |
| 481 | SDN JARANGAN II           | REJOSO  |
| 482 | SDN KAWISREJO             | REJOSO  |
| 483 | SDN KEDUNGBAKO            | REJOSO  |
| 484 | SDN KEMANTRENREJO I       | REJOSO  |
| 485 | SDN KETEGAN               | REJOSO  |
| 486 | SDN MANIKREJO             | REJOSO  |
| 487 | SDN PANDANREJO I          | REJOSO  |
| 488 | SDN PANDANREJO II         | REJOSO  |
| 489 | SDN PATUGURAN I           | REJOSO  |
| 490 | SDN PATUGURAN II          | REJOSO  |
| 491 | SDN REJOSO KIDUL I        | REJOSO  |
| 492 | SDN REJOSOLOR I           | REJOSO  |
| 493 | SDN SADENGREJO            | REJOSO  |
| 494 | SDN SAMBIREJO I           | REJOSO  |
| 495 | SDN SAMBIREJO II          | REJOSO  |
| 496 | SDN SEGOROPURO            | REJOSO  |
| 497 | SDN TOYANING I            | REJOSO  |
| 498 | SDN GENENG WARU           | REMBANG |
| 499 | SDN KALISAT I             | REMBANG |
| 500 | SDN KANIGORO              | REMBANG |
| 501 | SDN KEDUNG BANTENG I      | REMBANG |
| 502 | SDN KEDUNG BANTENG II     | REMBANG |
| 503 | SDN KRENGIH               | REMBANG |
| 504 | SDN MOJOPARON             | REMBANG |
| 505 | SDN ORO-ORO OMBOKULON I   | REMBANG |
| 506 | SDN ORO-ORO OMBOKULON II  | REMBANG |
| 507 | SDN ORO-ORO OMBOWETAN I   | REMBANG |
| 508 | SDN ORO-ORO OMBOWETAN III | REMBANG |
| 509 | SDNORO-ORO OMBOWETAN IV   | REMBANG |
| 510 | SDN OROBULU               | REMBANG |
| 511 | SDN PAJARAN I             | REMBANG |
| 512 | SDN PAJARAN II            | REMBANG |
| 513 | SDN PANDEAN I             | REMBANG |
| 514 | SDN PANDEAN II            | REMBANG |
| 515 | SDN PEJANGKUNGAN I        | REMBANG |
| 516 | SDN PEJANGKUNGAN II       | REMBANG |
| 517 | SDN PEKOREN I             | REMBANG |
| 518 | SDN PEKOREN III           | REMBANG |
| 519 | SDN REMBANG I             | REMBANG |

|     |                      |          |
|-----|----------------------|----------|
| 520 | SDN SIYAR            | REMBANG  |
| 521 | SDN SUMBER GLAGAH    | REMBANG  |
| 522 | SDN TAMPUNG I        | REMBANG  |
| 523 | SDN TAMPUNG II       | REMBANG  |
| 524 | SDN CANDIBINANGUN I  | SUKOREJO |
| 525 | SDN CANDIBINANGUN II | SUKOREJO |
| 526 | SDN CANDIBINANGUN IV | SUKOREJO |
| 527 | SDN CURAHREJO I      | SUKOREJO |
| 528 | SDN CURAHREJO II     | SUKOREJO |
| 529 | SDN DUKUHSARI        | SUKOREJO |
| 530 | SDN GLAGAHSARI I     | SUKOREJO |
| 531 | SDN GLAGAHSARI III   | SUKOREJO |
| 532 | SDN GUNTING I        | SUKOREJO |
| 533 | SDN GUNTING II       | SUKOREJO |
| 534 | SDN KALIREJO I       | SUKOREJO |
| 535 | SDN KALIREJO II      | SUKOREJO |
| 536 | SDN KALIREJO III     | SUKOREJO |
| 537 | SDN KARANGSONO       | SUKOREJO |
| 538 | SDN KENDURUAN I      | SUKOREJO |
| 539 | SDN KENDURUAN II     | SUKOREJO |
| 540 | SDN LECARI           | SUKOREJO |
| 541 | SDN LEMAHBANG I      | SUKOREJO |
| 542 | SDN LEMAHBANG II     | SUKOREJO |
| 543 | SDN MOJOTENGAH I     | SUKOREJO |
| 544 | SDN MOJOTENGAH II    | SUKOREJO |
| 545 | SDN NGADIMULYO       | SUKOREJO |
| 546 | SDN PAKUKERTO I      | SUKOREJO |
| 547 | SDN PAKUKERTO II     | SUKOREJO |
| 548 | SDN SEBANDUNG I      | SUKOREJO |
| 549 | SDN SEBANDUNG II     | SUKOREJO |
| 550 | SDN SUKORAME         | SUKOREJO |
| 551 | SDN SUKOREJO I       | SUKOREJO |
| 552 | SDN SUKOREJO III     | SUKOREJO |
| 553 | SDN SUKOREJO IV      | SUKOREJO |
| 554 | SDN SUWAYUWO I       | SUKOREJO |
| 555 | SDN SUWAYUWO II      | SUKOREJO |
| 556 | SDN TANJUNGARUM      | SUKOREJO |
| 557 | SDN WONOKERTO        | SUKOREJO |
| 558 | SDN BALEDONO I       | TOSARI   |
| 559 | SDN BALEDONO II      | TOSARI   |
| 560 | SDN KANDANGAN I      | TOSARI   |
| 561 | SDN KANDANGAN II     | TOSARI   |
| 562 | SDN MOROREJO I       | TOSARI   |
| 563 | SDN MOROREJO II      | TOSARI   |
| 564 | SDN NGADIWONO I      | TOSARI   |
| 565 | SDN NGADIWONO II     | TOSARI   |
| 566 | SDN PODOKOYO I       | TOSARI   |
| 567 | SDN PODOKOYO II      | TOSARI   |
| 568 | SDN PODOKOYO III     | TOSARI   |
| 569 | SDN SEDAENG I        | TOSARI   |
| 570 | SDN SEDAENG II       | TOSARI   |
| 571 | SDN TOSARI I         | TOSARI   |

|     |                      |          |
|-----|----------------------|----------|
| 572 | SDN TOSARI II        | TOSARI   |
| 573 | SDN WONOKITRI        | TOSARI   |
| 574 | SDN ANDONOSARI I     | TUTUR    |
| 575 | SDN ANDONOSARI II    | TUTUR    |
| 576 | SDN ANDONOSARI III   | TUTUR    |
| 577 | SDN ANDONOSARI IV    | TUTUR    |
| 578 | SDN BLARANG I        | TUTUR    |
| 579 | SDN BLARANG II       | TUTUR    |
| 580 | SDN BLARANG III      | TUTUR    |
| 581 | SDN GENDRO I         | TUTUR    |
| 582 | SDN GENDRO II        | TUTUR    |
| 583 | SDN KALIPUCANG I     | TUTUR    |
| 584 | SDN KALIPUCANG II    | TUTUR    |
| 585 | SDN KALIPUCANG III   | TUTUR    |
| 586 | SDN KAYUKEBEK I      | TUTUR    |
| 587 | SDN KAYUKEBEK III    | TUTUR    |
| 588 | SDN NGADIREJO I      | TUTUR    |
| 589 | SDN NGADIREJO II     | TUTUR    |
| 590 | SDN NGEMBAL I        | TUTUR    |
| 591 | SDN NGEMBAL II       | TUTUR    |
| 592 | SDN NGEMBAL III      | TUTUR    |
| 593 | SDN NGEMBAL IV       | TUTUR    |
| 594 | SDN NONGKOJAJAR I    | TUTUR    |
| 595 | SDN PUNGGING         | TUTUR    |
| 596 | SDN SUMBERPITU I     | TUTUR    |
| 597 | SDN SUMBERPITU II    | TUTUR    |
| 598 | SDN TLOGOBODOSARI I  | TUTUR    |
| 599 | SDN TLOGOBODOSARI II | TUTUR    |
| 600 | SDN TUTUR I          | TUTUR    |
| 601 | SDN TUTUR II         | TUTUR    |
| 602 | SDN WONOSARI I       | TUTUR    |
| 603 | SDN WONOSARI II      | TUTUR    |
| 604 | SDN BANDARAN I       | WINONGAN |
| 605 | SDN BANDARAN II      | WINONGAN |
| 606 | SDN GADING I         | WINONGAN |
| 607 | SDN GADING II        | WINONGAN |
| 608 | SDN JELADRI I        | WINONGAN |
| 609 | SDN JELADRI II       | WINONGAN |
| 610 | SDN KANDUNG          | WINONGAN |
| 611 | SDN KARANGTENGAH     | WINONGAN |
| 612 | SDN KEDUNGREJO       | WINONGAN |
| 613 | SDN LEBAK            | WINONGAN |
| 614 | SDN MENDALAN II      | WINONGAN |
| 615 | SDN MENYARIK         | WINONGAN |
| 616 | SDN MINGGIR          | WINONGAN |
| 617 | SDN PENATAAN         | WINONGAN |
| 618 | SDN PRODO            | WINONGAN |
| 619 | SDN SIDEPAN          | WINONGAN |
| 620 | SDN SRUWI            | WINONGAN |
| 621 | SDN SUMBEREJO        | WINONGAN |
| 622 | SDN UMBULAN          | WINONGAN |
| 623 | SDN WINONGAN KIDUL   | WINONGAN |

|           |                              |                  |
|-----------|------------------------------|------------------|
| 624       | SDN WINONGAN LOR I           | WINONGAN         |
| 625       | SDN WINONGAN LOR II          | WINONGAN         |
| 626       | SDN COBANBLIMBING I          | WONOREJO         |
| 627       | SDN COBANBLIMBING II         | WONOREJO         |
| 628       | SDN JATIGUNTING I            | WONOREJO         |
| 629       | SDN JATIGUNTING II           | WONOREJO         |
| 630       | SDN KARANGASEM               | WONOREJO         |
| 631       | SDN KARANGJATIANYAR I        | WONOREJO         |
| 632       | SDN KARANGJATIANYAR II       | WONOREJO         |
| 633       | SDN KARANGJATIANYAR III      | WONOREJO         |
| 634       | SDN KARANGMENGGAH            | WONOREJO         |
| 635       | SDN KARANGSONO               | WONOREJO         |
| 636       | SDN KENDANGDUKUH             | WONOREJO         |
| 637       | SDN KLUWUT                   | WONOREJO         |
| 638       | SDN LEBAKSARI                | WONOREJO         |
| 639       | SDN PAKIJANGAN I             | WONOREJO         |
| 640       | SDN PAKIJANGAN II            | WONOREJO         |
| 641       | SDN REBONO I                 | WONOREJO         |
| 642       | SDN REBONO II                | WONOREJO         |
| 643       | SDN SAMBISIRAH I             | WONOREJO         |
| 644       | SDN SAMBISIRAH II            | WONOREJO         |
| 645       | SDN TAMANSARI                | WONOREJO         |
| 646       | SDN WONOREJO I               | WONOREJO         |
| 647       | SDN WONOREJO IV              | WONOREJO         |
| 648       | SDN WONOREJO V               | WONOREJO         |
| 649       | SDN WONOSARI                 | WONOREJO         |
| <b>NO</b> | <b>UPT SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>KECAMATAN</b> |
| 1         | SMPN 1 BANGIL                | BANGIL           |
| 2         | SMPN 2 BANGIL                | BANGIL           |
| 3         | SMPN 3 BANGIL                | BANGIL           |
| 4         | SMPN 4 BANGIL SATU ATAP      | BANGIL           |
| 5         | SMPN 1 BEJI                  | BEJI             |
| 6         | SMPN 2 BEJI                  | BEJI             |
| 7         | SMPN 1 GEMPOL                | GEMPOL           |
| 8         | SMPN 2 GEMPOL                | GEMPOL           |
| 9         | SMPN 3 GEMPOL SATU ATAP      | GEMPOL           |
| 10        | SMPN 1 GONDANGWETAN          | GONDANGWETAN     |
| 11        | SMPN 2 GONDANGWETAN          | GONDANGWETAN     |
| 12        | SMPN 1 GRATI                 | GRATI            |
| 13        | SMPN 2 GRATI                 | GRATI            |
| 14        | SMPN 3 GRATI SATU ATAP       | GRATI            |
| 15        | SMPN 1 KEJAYAN               | KEJAYAN          |
| 16        | SMPN 2 KEJAYAN               | KEJAYAN          |
| 17        | SMPN 1 KRATON                | KRATON           |
| 18        | SMPN 2 KRATON                | KRATON           |
| 19        | SMPN 1 LEKOK                 | LEKOK            |
| 20        | SMPN 1 LUMBANG               | LUMBANG          |
| 21        | SMPN 2 LUMBANG               | LUMBANG          |
| 22        | SMPN 3 LUMBANG SATU ATAP     | LUMBANG          |
| 23        | SMPN 4 LUMBANG SATU ATAP     | LUMBANG          |
| 24        | SMPN 1 NGULING               | NGULING          |
| 25        | SMPN 2 NGULING               | NGULING          |

|    |                            |            |
|----|----------------------------|------------|
| 26 | SMPN 3 NGULING             | NGULING    |
| 27 | SMPN 4 NGULING             | NGULING    |
| 28 | SMPN 1 PANDAAN             | PANDAAN    |
| 29 | SMPN 2 PANDAAN             | PANDAAN    |
| 30 | SMPN 1 PASREPAN            | PASREPAN   |
| 31 | SMPN 2 PASREPAN            | PASREPAN   |
| 32 | SMPN 3 PASREPAN SATU ATAP  | PASREPAN   |
| 33 | SMPN 4 PASREPAN SATU ATAP  | PASREPAN   |
| 34 | SMPN 1 POHJENTREK          | POHJENTREK |
| 35 | SMPN 1 PRIGEN              | PRIGEN     |
| 36 | SMPN 2 PRIGEN              | PRIGEN     |
| 37 | SMPN 1 PURWODADI           | PURWODADI  |
| 38 | SMPN 2 PURWODADI           | PURWODADI  |
| 39 | SMPN 3 PURWODADI           | PURWODADI  |
| 40 | SMPN 1 PURWOSARI           | PURWOSARI  |
| 41 | SMPN 2 PURWOSARI           | PURWOSARI  |
| 42 | SMPN 3 PURWOSARI SATU ATAP | PURWOSARI  |
| 43 | SMPN 1 PUSPO               | PUSPO      |
| 44 | SMPN 2 PUSPO SATU ATAP     | PUSPO      |
| 45 | SMPN 3 PUSPO SATU ATAP     | PUSPO      |
| 46 | SMPN 4 PUSPO SATU ATAP     | PUSPO      |
| 47 | SMPN 1 REJOSO              | REJOSO     |
| 48 | SMPN 2 REJOSO              | REJOSO     |
| 49 | SMPN 1 REMBANG             | REMBANG    |
| 50 | SMPN 2 REMBANG             | REMBANG    |
| 51 | SMPN 1 SUKOREJO            | SUKOREJO   |
| 52 | SMPN 2 SUKOREJO            | SUKOREJO   |
| 53 | SMPN 1 TOSARI              | TOSARI     |
| 54 | SMPN 2 TOSARI SATU ATAP    | TOSARI     |
| 55 | SMPN 3 TOSARI SATU ATAP    | TOSARI     |
| 56 | SMPN 4 TOSARI SATU ATAP    | TOSARI     |
| 57 | SMPN 1 TUTUR               | TUTUR      |
| 58 | SMPN 2 TUTUR               | TUTUR      |
| 59 | SMPN 3 TUTUR SATU ATAP     | TUTUR      |
| 60 | SMPN 1 WINONGAN            | WINONGAN   |
| 61 | SMPN 2 WINONGAN            | WINONGAN   |
| 62 | SMPN 1 WONOREJO            | WONOREJO   |
| 63 | SMPN 2 WONOREJO            | WONOREJO   |

## Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p terdiri atas :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Dikecualikan Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q, terdiri atas :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

## Pasal 9

- (1) UPT Latihan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan.
- (2) UPT Latihan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan UPT Latihan Kerja Daerah;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan institusional dan non institusional ketrampilan berbasis kompetensi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan uji ketrampilan, kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan operasional UPT Latihan Kerja Daerah;
  - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan tenaga kerja terampil;
  - f. penyiapan bahan pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi tenaga kerja; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Latihan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menerima berkas permohonan pendaftaran pelatihan dari masyarakat;
  - b. melaksanakan verifikasi dan validasi berkas, terkait keabsahan, keaslian dan kelengkapan data dari pemohon;
  - c. memberikan bukti tanda terima bagi berkas permohonan yang telah valid dan lengkap;
  - d. melaksanakan seleksi berkas permohonan pelatihan dari masyarakat telah dilakukan verifikasi dan validasi untuk dilakukan proses pemanggilan calon peserta pelatihan yang telah lulus seleksi (sesuai dengan kebutuhan program pelatihan) untuk mengikuti pelatihan di UPT Latihan Kerja Daerah;
  - e. menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang telah lulus verifikasi dan validasi berkas;
  - f. memberikan rekomendasi teknis untuk pemberian sertifikat;
  - g. melaporkan kegiatan pelatihan secara berkala; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 10

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP Laboratorium Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan.

- (2) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.
  - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
  - c. pelaksanaan pelayanan uji laboratorium kualitas lingkungan kepada instansi pemerintah, industri dan masyarakat umum;
  - d. pelaksanaan pertimbangan teknis sebagai laboratorium lingkungan rujukan di wilayah kabupaten;
  - e. pemberian pertimbangan hasil analisis laboratoris terhadap rekomendasi lingkungan hidup;
  - f. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan teknis di UPT berdasarkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar ;
  - b. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT;
  - c. membimbing pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar;
  - e. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar;
  - f. melaksanakan pedoman petunjuk teknis kegiatan Standar Operasional Pelayanan (SOP), Standar pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) UPT Laboratorium Lingkungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar;
  - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas kinerja dan rencana kerja yang akan datang; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 11

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor dan tugas pembantuan.
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data kendaraan wajib uji;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
  - c. pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor;
  - d. pelaksanaan penertiban atau rampcheck secara teknis dan berkala pada mobil barang dan penumpang di wilayah kabupaten;
  - e. penyiapan bahan penilaian pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan, lelang dan/atau dijadikan hak kepemilikan;
  - f. penerbitan surat keterangan atau rekomendasi untuk : kendaraan baru, mutasi masuk, mutasi keluar, rubah bentuk, rubah sifat, numpang uji keluar, numpang uji masuk;
  - g. penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
  - h. pemberian pelayanan secara maksimal sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan yang telah ditetapkan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. membantu kepala dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT pengujian kendaraan bermotor;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
  - d. melaksanakan pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor;
  - e. menyiapkan bahan penyusun petunjuk teknis, pemberian akreditasi, dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor, serta pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT pengujian kendaraan bermotor;
  - g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - h. mengadakan koordinasi/ kerjasama dengan dinas/ instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - i. memberikan saran pertimbangan kepada kepala dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;



- j. membuat daftar penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terhadap bawahan;
- k. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi, penyusunan anggaran dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor;
- m. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga UPT dan hubungan kemasyarakatan;
- n. melaksanakan penyusunan program dan anggaran UPT pengujian kendaraan bermotor;
- o. melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pengujian kendaraan bermotor dari pemilik atau kuasa kendaraan berupa pencatatan, pemberitahuan atau pemanggilan, penyelesaian akhir konsep naskah dan lain – lain sejenisnya;
- p. melaksanakan pencatatan atas berkas permohonan atau arsip pengujian kendaraan bermotor;
- q. melaksanakan penyusunan laporan jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji secara periodik;
- r. melaksanakan penyelesaian akhir administrasi pengujian kendaraan bermotor, setelah pemohon menyelesaikan uji kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji;
- s. melaksanakan penyerahan dan penerimaan kartu uji serta sertifikat uji;
- t. melaksanakan penerbitan dan penyerahan surat keterangan kesanggupan uji kendaraan bermotor kepada pemohon; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 12

- (1) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, UPT Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang penyuluhan pertanian, bidang kesehatan hewan, bidang pemotongan hewan, bidang budidaya ternak, dan bidang perikanan serta tugas pembantuan.
- (2) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan fasilitasi persiapan penyuluhan pertanian melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data potensi wilayah, penyusunan program penyuluhan pertanian, dan penyusunan materi penyuluhan pertanian;

- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian, dengan membuat dan menggunakan media penyuluhan, menerapkan berbagai metode penyuluhan pertanian, serta pelayanan konsultasi agribisnis;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian;
  - e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan;
  - g. pelaksanaan supervisi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengembangkan, serta mengevaluasi kegiatan bidangnya agar dapat dicapai tujuan dan sasaran berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
  - c. mengawasi dan melaporkan kondisi aset UPT kepada Kepala Dinas secara berkala;
  - d. dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dibantu oleh Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (4) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
  - b. pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium ;
  - c. pelaksanaan pelayanan medik reproduksi;
  - d. pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan;
  - e. pelaksanaan penyeliaan petugas paramedik : inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan pemeriksaan gangguan reproduksi;
  - f. pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit;
  - g. pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi pengawasan keamanan produk hewan hygiene sanitasi lingkungan peternakan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
  - h. pelaksanaan teknis pembinaan kelompok ternak di wilayah kerja Puskesmas;
  - i. pelaksanaan inventarisasi data potensi peternakan di wilayah kerja Puskesmas;

- j. penyusunan peta penyakit hewan di wilayah kerja Puskesmas; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengembangkan, serta mengevaluasi kegiatan bidangnya agar dapat dicapai tujuan dan sasaran berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
  - c. mengawasi dan melaporkan kondisi aset UPT kepada Kepala Dinas secara berkala;
  - d. dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dibantu oleh Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (6) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengawasan pelayanan *ante mortem* (sebelum hewan dipotong) yang meliputi : penyediaan kandang peristirahatan ternak, pemeriksaan kesehatan ternak, pengawasan dan penerapan pengendalian pemotongan penolakan ternak betina produktif;
  - b. pelaksanaan penyiapan pemakaian fasilitas dan peralatan pemotongan ternak sesuai kaidah kesejahteraan hewan;
  - c. pelaksanaan pengawasan pelayanan *post mortem* (sesudah hewan dipotong) yang meliputi : pengamatan kesehatan daging dan peneguhan penyakit, pemberian cap tinta daging, pemberian surat edar daging, pemakaian kendaraan angkut daging, penyediaan alat dan penggunaan tempat pelayuan daging, pemakaian timbangan daging;
  - d. pelaksanaan penerapan standar teknis meliputi sebagaimana aturan yang telah ditentukan dalam pengelolaan produk pangan hewan dan hygiene sanitasi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (7) Kepala UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengembangkan, serta mengevaluasi kegiatan bidangnya agar dapat dicapai tujuan dan sasaran berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
  - c. mengawasi dan melaporkan kondisi aset UPT kepada Kepala Dinas secara berkala;
  - d. dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dibantu oleh Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (8) UPT Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan percontohan ternak unggul;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan aplikasi teknologi/bioteknologi peternakan dan pengembangan sumberdaya peternakan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pembelajaran Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan agrowisata;
  - e. pelaksanaan pengelolaan lahan, pakan, Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan limbah ternak; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (9) Kepala UPT Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengembangkan, serta mengevaluasi kegiatan bidangnya agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
  - c. mengawasi dan melaporkan kondisi aset UPT kepada Kepala Dinas secara berkala;
  - d. dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dibantu oleh Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (10) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, mempunyai fungsi :
- a. pengembangan produksi benih ikan air tawar/air payau yang bermutu dalam rangka memenuhi kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya ikan;
  - b. pengembangan dan pengelolaan calon induk ikan air tawar/air payau yang bermutu;
  - c. penyiapan kebijakan pengelolaan perbenihan dan pola pengembangan produksi perbenihan ikan air tawar/air payau;
  - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
  - e. pelayanan pelatihan, magang dan konsultasi perbenihan dan budidaya ikan bagi pelajar/mahasiswa, Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan masyarakat;
  - f. penerapan standar operasional pembenihan ikan air tawar/air payau sesuai Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) Perbenihan;
  - g. pengendalian dan pengawasan mutu benih ikan air tawar/air payau;
  - h. pelaksanaan pengembangan teknologi perbenihan ikan dan budidaya ikan dalam rangka uji lapang;
  - i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (11) Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran UPT;
  - b. menyiapkan bahan pengembangan produksi benih ikan air tawar/air payau bermutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan;
  - c. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan calon induk ikan air tawar/air payau;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan sesuai Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) Perbenihan serta pengendalian dan pengawasan mutu benih ikan;
  - e. menyiapkan perencanaan arah kebijakan pemasaran;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengembangan teknologi, monitoring kualitas air, pengendalian hama penyakit ikan di UPT dan uji lapang budidaya perikanan;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana Pelatihan, magang dan pembinaan dan pengembangan UPR;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan program administrasi umum dan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
  - i. menyiapkan bahan pelaporan dan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf , mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan tugas pembantuan.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. penerimaan laporan atau penjangkauan korban;
  - b. pemberian informasi tentang hak korban;
  - c. pemfasilitasian pemberian layanan kesehatan;
  - d. pemfasilitasian pemberian layanan penguatan psikologis;
  - e. pemfasilitasian pemberian layanan psikososial;
  - f. penyediaan layanan pendampingan hukum;
  - g. pemfasilitasian penampungan sementara;
  - h. pengidentifikasian kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
  - i. pengidentifikasian kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
  - j. pemfasilitasian kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;

- k. pengkoordinasian dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya;
  - l. pemantauan pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan;
  - m. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
  - n. pelaksanaan penataan pola pelayanan;
  - o. pelaksanaan penjaminan kualitas pelayanan;
  - p. pelaksanaan penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat;
  - q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
  - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional Unit Pelaksana Teknis;
  - c. memverifikasi bahan penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
  - d. mengoordinasikan penjagaan standar pelayanan dan objektivitas personil;
  - e. melaksanakan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - f. mengoordinasikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - g. mengoordinasikan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pada lingkup antar kabupaten/kota, Provinsi maupun lintas provinsi;
  - h. mengoordinasikan pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - i. mengoordinasikan layanan pengelolaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - j. mengoordinasikan layanan rujukan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - k. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pelayanan tindakan dan rujukan terhadap kasus perlindungan perempuan dan anak;
  - l. mengoordinasikan penyebarluasan informasi dan publikasi terkait layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
  - m. mengoordinasikan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
  - n. memverifikasi konsep pengembangan jejaring dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak;

- o. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan tindak lanjut dan pendampingan bagi perempuan dan anak;
- p. melaksanakan urusan tata usaha;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan layanan pengaduan langsung dan tidak langsung/layanan penjangkauan;
- s. melaksanakan layanan mediasi;
- t. melaksanakan pendampingan dan layanan konseling hukum;
- u. melaksanakan layanan pemeriksaan psikologi oleh psikolog
- v. melaksanakan layanan konseling oleh konselor;
- w. melaksanakan layanan konseling oleh pemuka agama dalam hal pemulihan mental;
- x. melaksanakan pendampingan layanan medis di fasilitas kesehatan;
- y. melaksanakan pelayanan di rumah perlindungan perempuan dan anak;
- z. melaksanakan pendampingan klien untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial;
- aa. melaksanakan layanan pemulangan klien dari shelter;
- bb. melaksanakan pengolahan data;
- cc. melaksanakan publikasi di media cetak/elektronik;
- dd. melaksanakan manajemen kasus/bedah kasus;
- ee. melaksanakan pelayanan trauma healing (pemulihan mental klien);
- ff. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- gg. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
- hh. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Dinas secara berkala; dan
- ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) UPT Pengelolaan Kayu dan Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, dan UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang Pengelolaan Kayu dan Logam dan pengelolaan Pasar, serta tugas pembantuan.
- (2) UPT Pengelolaan Kayu dan Logam sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf j, mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan jasa kayu dan logam;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kayu dan logam guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan aset-aset dinas pada UPT;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Pengelolaan Kayu dan Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja tahunan;
  - b. menyusun rencana anggaran UPT;
  - c. melaksanakan pelayanan teknis, sarana usaha industri kayu dan logam serta produk kayu dan logam;
  - d. melaksanakan alih teknologi industri kayu dan logam serta produk kayu dan logam dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
  - e. melaksanakan pendampingan teknis dibidang industri kayu dan logam serta produk kayu dan logam;
  - f. melaksanakan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri kayu dan logam dengan instansi terkait;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kayu dan logam serta produk kayu dan logam guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - h. melaksanakan ketatausahaan;
  - i. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan aset – aset dinas pada UPT;
  - j. melaksanakan pengelolaan administrasi Umum, kepegawaian dan keuangan;
  - k. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan harian, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (4) UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan pengelolaan pasar;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pengelolaan pasar guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan aset-aset dinas pada UPT;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja tahunan;
  - b. menyusun rencana anggaran UPT;
  - c. menyusun petunjuk teknis operasional pasar daerah;



- d. melaksanakan pengelolaan pasar secara optimal untuk meningkatkan pelayanan, produktivitas dan aktivitas jual beli dipasar;
- e. melaksanakan pengaturan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang melakukan jual beli di lahan pasar dan pedagang kaki lima (PKL) di area pasar daerah;
- f. melaksanakan validasi permohonan penerbitan buku hak sewa menempati tempat usaha di lingkungan Pasar;
- g. melaksanakan pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana barang milik daerah pada UPT;
- h. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar serta pedagang kaki lima (PKL) di area pasar daerah;
- i. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan penertiban khususnya terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana dan bahaya kebakaran lingkungan pasar;
- j. melaksanakan penanganan dan penyelesaian permasalahan pedagang di lingkungan pasar;
- k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyegelan dan/atau pembukaan kembali kios, rumah toko, atau los;
- l. membantu pengawasan, pemeliharaan dan fisik bangunan di pasar daerah;
- m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pedagang dan pedagang kaki lima (PKL) dalam rangka peningkatan pendapatan dari sektor pasar daerah;
- n. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi dan pengadministrasian retribusi pelayanan pasar guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi Umum, kepegawaian dan keuangan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan harian, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar daerah; dan
- s. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Pandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Purwosari huruf m, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan huruf n, dan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Grati huruf o, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
  - b. pelaksanaan operasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;
  - c. pelaksanaan dan melakukan pengawasan pemeliharaan serta rehabilitasi sumber-sumber air dan infrastruktur sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;
  - d. pelaksanaan pertimbangan teknis terhadap pengawasan, pengendalian dan perizinan penggunaan air, sumber air, tanah dan aset;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri serta data sumber daya air lainnya;
  - g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
  - h. pelaksanaan pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA), Induk Himpunan Pemakai Air (IHIPPA) untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan tingkat UPT;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - c. melaksanakan pengaturan air pada jaringan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;
  - d. melaksanakan pengoperasian sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;
  - e. melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri serta data sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;
  - f. melaksanakan pemberian dan pertimbangan teknis terhadap pengawasan, pengendalian dan perizinan penggunaan air, sempadan saluran;
  - g. melaksanakan pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
  - h. melaksanakan pemantauan pencemaran air dan sumber-sumber air;
  - i. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi serta fungsi prasarana dan sarana sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;
  - j. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;

- k. melaksanakan pengawasan teknis pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;
- l. menyiapkan bahan pengelolaan aset irigasi;
- m. melaksanakan pembinaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan tingkat UPT
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan Pelayanan Laboratorium kesehatan mencakup Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan Laboratorium dan kegiatan rujukan; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. sebagai pemberi pelayanan Laboratorium Klinik berfungsi menunjang Upaya Kesehatan Perorangan yang mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan; dan
  - b. sebagai pemberi pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, berfungsi menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, Pemberantasan Penyakit, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
- (3) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengembangan sistem perencanaan laboratorium;
  - b. melaksanakan pengembangan ketatausahaan;
  - c. melaksanakan pengembangan pada pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan lingkungan;
  - d. melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun instansi lain di luar Labkesda; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Pasal 17

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang pendidikan

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi pendidikan;
  - b. penegelolaan sarana prasarana;
  - c. pengelolaan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan;
  - d. pengelolaan kurikulum;
  - e. pengelolaan proses dan penilaian pendidikan pembelajaran;
  - f. penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
  - g. pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
  - h. pelaksanaan pembinaan pendidikan karakter siswa;
  - i. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang ramah bagi anak; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan UPT Satuan Pendidikan dalam rangka membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi :
- a. bidang manajerial yang meliputi :
    - 1) menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah;
    - 2) mengelola administrasi kepegawaian, umum dan keuangan;
    - 3) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran;
    - 4) mengelola Standar Nasional Pendidikan;
    - 5) melaksanakan pembinaan kesiswaan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar;
    - 6) melaksanakan kepemimpinan pembelajaran di lingkungan sekolah;
    - 7) pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi manajerial; dan
    - 8) pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
  - b. bidang pengembangan kewirausahaan yang meliputi :
    - 1) merencanakan program pengembangan kewirausahaan yang unggul dan berdaya saing;
    - 2) melaksanakan program pengembangan kewirausahaan;
    - 3) melaksanakan pengembangan dan inovasi sekolah; dan
    - 4) evaluasi program pengembangan kewirausahaan.
  - c. bidang supervisor yang meliputi :
    - 1) merencanakan supervisi akademis dan manajerial;
    - 2) melaksanakan supervisi akademis dan manajerial kepada guru dan tenaga kependidikan;
    - 3) membimbing, membantu guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme;

- 4) mengembangkan potensi guru dan tenaga kependidikan untuk berinovasi;
  - 5) menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif; dan
  - 6) evaluasi hasil pelaksanaan supervisi akademis dan manajerial.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

### JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 18

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (8) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (9) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang saat ini menduduki jabatannya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilaksanakannya pengisian jabatan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 151);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 156);

- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 162);
  - d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 172);
  - e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 174);
  - f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 178);
  - g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 184 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 184);
  - h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 186);
  - i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 189);
  - j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 192); dan
  - k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 193 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 193);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Oktober 2025  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

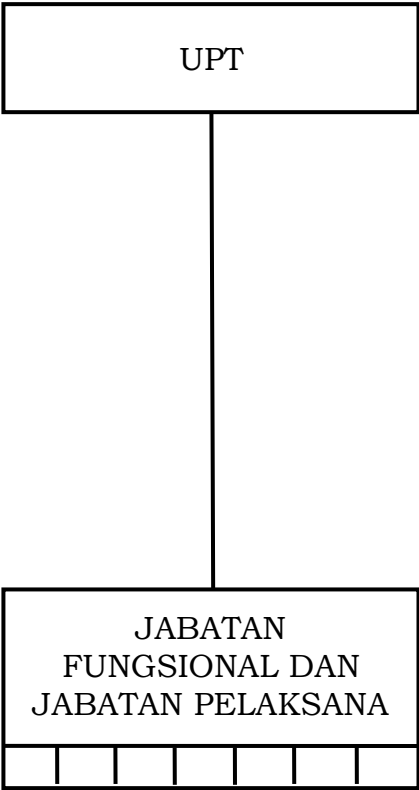
YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 62



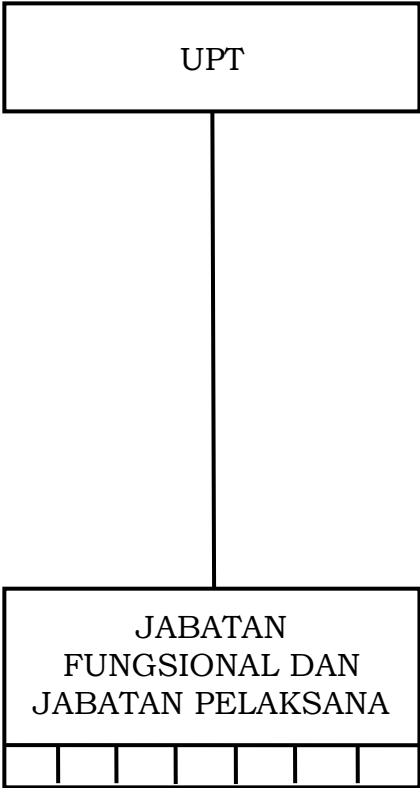
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 62 TAHUN 2025  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PADA DINAS DAN BADAN

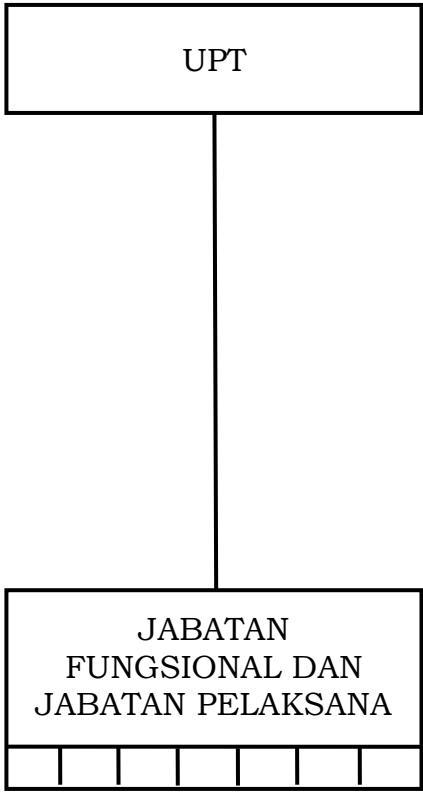
I. UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I DAN UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH II PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH



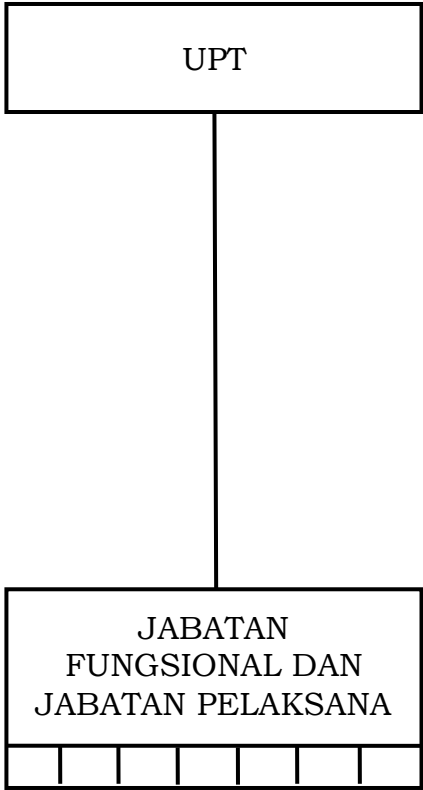
II. UPT LATIHAN KERJA DAERAH PADA DINAS KETENAGAKERJAAN



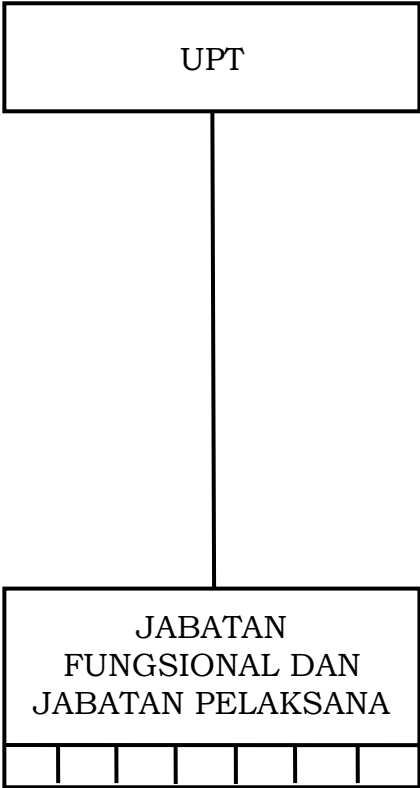
III. UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



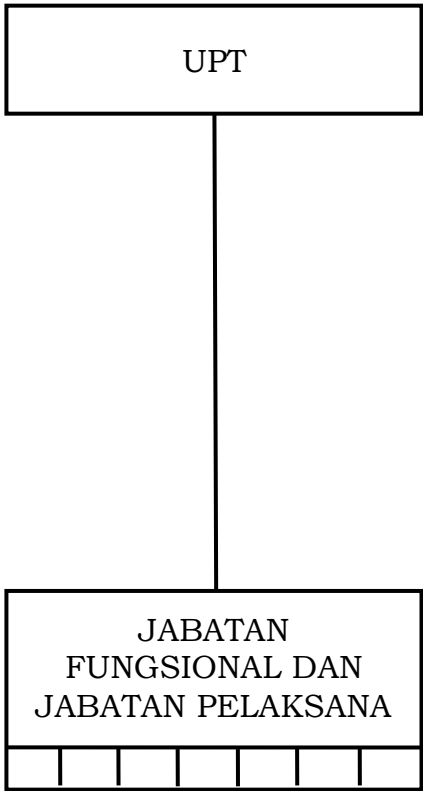
IV. UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN



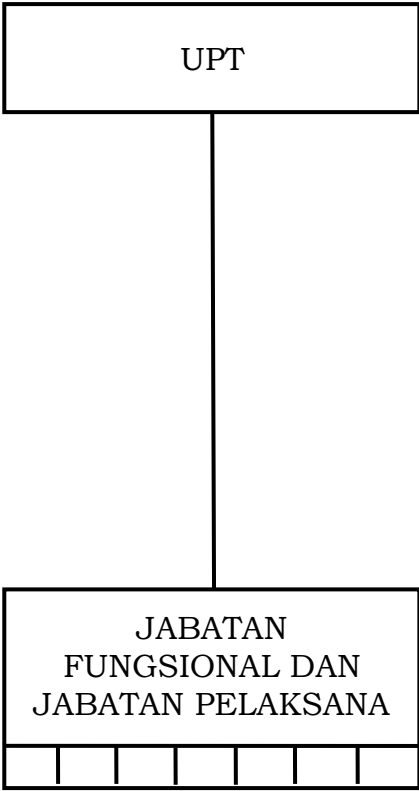
V. UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN, UPT RUMAH POTONG HEWAN, DAN UPT BUDIDAYA TERNAK, UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN.



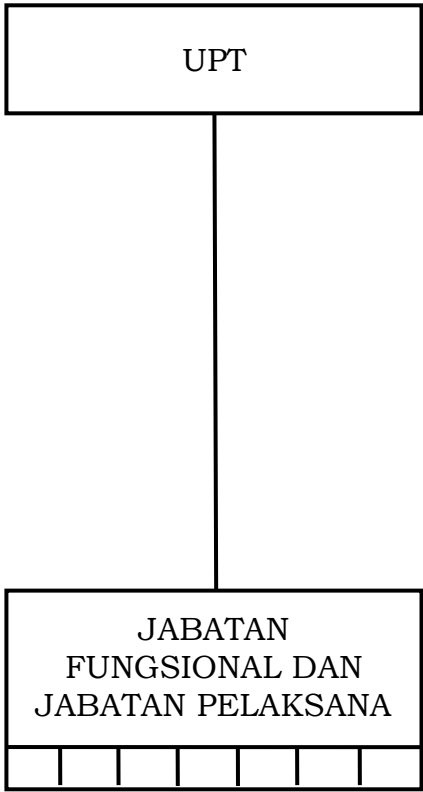
VI. UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.



VII. UPT PENGELOLAAN KAYU DAN LOGAM, SERTA UPT PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

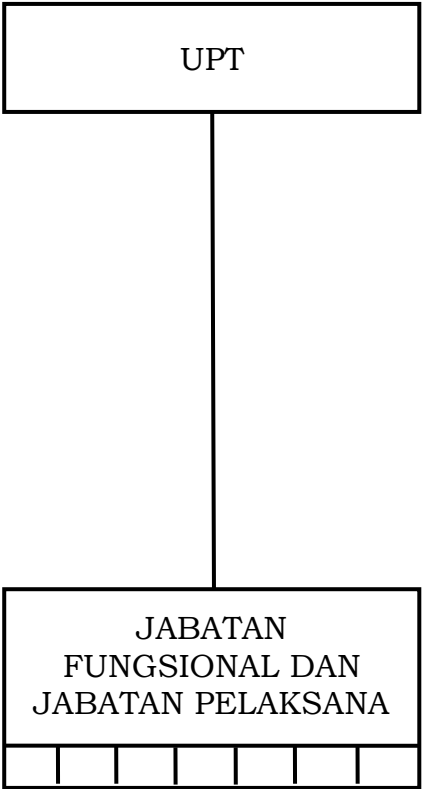


VIII. UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI.

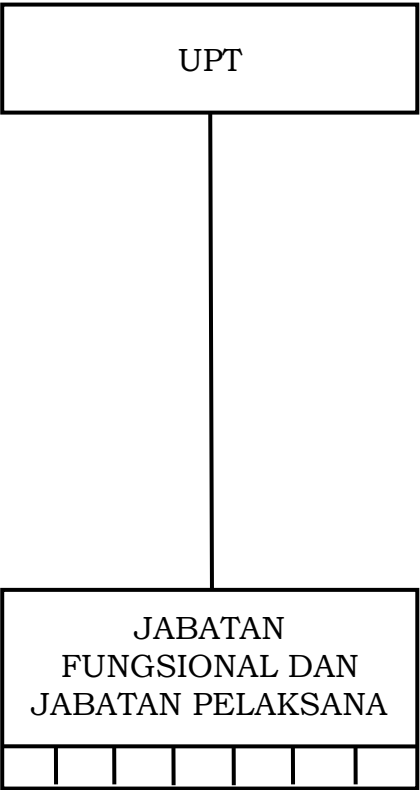




IX. UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH, PERLINDUNGAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.



X. UPT SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

SALINAN DARI SALINAN

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/O/1980

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat

: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
2. tanggal 9 April 1977 No. 0255/U/1977.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

P e r t a m a

: Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

K e d u a

: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

K e t i g a

: Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

K e e m p a t

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

K e l i n a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

( Soetanto Wirjoprasanto ).-



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Semua Universitas/ Institut / Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P dan K,
17. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Ditjen Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
Dep P dan K

ttd.

Soejoto, SH.  
NIP : 130317250.-

Disalin sesuai dengan salinan Portana

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa - Timur  
Sekretaris,

( Drs. Achmad )  
NIP : 130099554.-



KEPUTUSAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 30 Juli 1960 No. 0206/0/1960.

| Provinsi/Daerah<br>Tingkat I | No.<br>Urut | Nama Sekolah yang dibuka | L o k a s i    |                       | Biaya<br>( Mata Anggaran ) |
|------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
|                              |             |                          | Kecamatan      | Kabupaten / Kotanadya |                            |
| 1                            | 2           | 3                        | 4              | 5                     | 6                          |
| Jawa Timur                   | 1           | SMP Negeri XVII Surabaya | Rungkut        | Kotanadya Surabaya    | 09.1.2.1038.23.01.05.110   |
|                              | 2           | SMP Negeri Pademawu      | Pademawu       | Kabupaten Pamekasan   | 09.1.2.1038.23.01.05.120   |
|                              | 3           | SMP Negeri Ampelgading   | Ampelgading    | Kabupaten Malang      | 09.1.2.1038.23.01.05.140   |
|                              | 4           | SMP Negeri Sangkapura    | Sangkapura     | Kabupaten Gresik      | 09.1.2.1038.23.01.05.210   |
|                              | 5           | SMP Negeri Kamin         | Kamin          | Kabupaten Lumajang    | 09.1.2.1038.23.01.05.220   |
|                              | 6           | SMP Negeri V Pasuruan    | Kecamatan Kota | Kotanadya Pasuruan    | 09.1.2.1038.23.01.05.231   |
|                              | 7           | SMP Negeri Arjasa        | Arjasa         | Kabupaten Situbondo   | 09.1.2.1038.23.01.05.232   |
|                              | 8           | SMP Negeri Kalitidu      | Kalitidu       | Kabupaten Bojonegara  | 09.1.2.1038.23.01.05.233   |
|                              | 9           | SMP Negeri Waru Sidoarjo | Waru           | Kabupaten Sidoarjo    | 09.1.2.1038.23.01.05.250   |
|                              | 10          | SMP Negeri Puri          | Puri           | Kabupaten Mojokerto   | 09.1.2.1038.23.01.05.340   |
|                              | 11          | SMP Negeri Kwadungan     | Kwadungan      | Kabupaten Ngawi       | 09.1.2.1038.23.01.05.350   |
|                              | 12          | SMP Negeri Lengkong      | Lengkong       | Kabupaten Nganjuk     |                            |
|                              | 13          | SMP Negeri Udanawu       | Udanawu        | Kabupaten Blitar      |                            |
|                              | 14          | SMP Negeri Sumbergenpol  | Sumbergenpol   | Kabupaten Tulungagung |                            |
|                              | 15          | SMP Negeri Gondangwetan  | Gondangwetan   | Kabupaten Pasuruan    |                            |
|                              | 16          | SMP Negeri Tongas        | Tongas         | Kabupaten Probolinggo |                            |
|                              | 17          | SMP Negeri XI Malang     | Blimbing       | Kotanadya Malang      |                            |
|                              | 18          | SMP Negeri Ambulu        | Ambulu         | Kabupaten Jember      |                            |
|                              | 19          | SMP Negeri Saronggi      | Saronggi       | Kabupaten Sumenep     |                            |
|                              | 20          | SMP Negeri Tambakboyo    | Tambakboyo     | Kabupaten Tuban       |                            |

21 . SMP Negeri .....



| 1 | 2  | 3                       | 4              | 5                     | 6 |
|---|----|-------------------------|----------------|-----------------------|---|
|   | 21 | SMP Negeri Slahung      | Slahung        | Kabupaten Pohorogo    |   |
|   | 22 | SMP Negeri Plosoklaten  | Plosoklaten    | Kabupaten Kediri      |   |
|   | 23 | SMP Negeri XVI Surabaya | Karangpilang   | Kotamadya Surabaya    |   |
|   | 24 | SMA Negeri VI Malang    | Kedungkandang  | Kotamadya Malang      |   |
|   | 25 | SMA Negeri Krian        | Krian          | Kabupaten Sidoarjo    |   |
|   | 26 | SMA Negeri Bondowoso    | Kecamatan Kota | Kabupaten Bondowoso   |   |
|   | 27 | SMA Negeri Mandat       | Kandat         | Kabupaten Kediri      |   |
|   | 28 | SMA Negeri Sumberoyo    | Sumberoyo      | Kabupaten Bojonegoro  |   |
|   | 29 | SMA Negeri Kalianget    | Kalianget      | Kabupaten Sunanep     |   |
|   | 30 | SMA Negeri Ngawi        | Ngawi          | Kabupaten Ngawi       |   |
|   | 31 | SMA Negeri Nganjuk      | Nganjuk        | Kabupaten Nganjuk     |   |
|   | 32 | SMA Negeri Tulungagung  | Boyolangu      | Kabupaten Tulungagung |   |
|   | 33 | SMA Negeri Mojokerto    | Mojokerto      | Kabupaten Mojokerto   |   |
|   | 34 | SMA Negeri Jombang      | Jombang        | Kabupaten Jombang     |   |
|   | 35 | SMA Negeri Lamongan     | Lamongan       | Kabupaten Lamongan    |   |
|   | 36 | SMA Negeri Bojonegoro   | Bojonegoro     | Kabupaten Bojonegoro  |   |
|   | 37 | SMA Negeri Pamekasan    | Pamekasan      | Kabupaten Pamekasan   |   |
|   | 38 | SMA Negeri Banyuwangi   | Banyuwangi     | Kabupaten Banyuwangi  |   |
|   | 39 | SMA Negeri Pare         | Pare           | Kabupaten Kediri      |   |
|   | 40 | SMA Negeri Bondowoso    | Bondowoso      | Kabupaten Bondowoso   |   |

41. STM Negeri .....